

**ANALISIS PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN
DAERAH DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALEMBANG
(Studi Kasus Pada Kantor Wali kota Palembang)**

SKRIPSI



**Nama : Agung Pernandu
NIM : 222016135**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2023

SKRIPSI

**ANALISIS PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN
DAERAH DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALEMBANG
(Studi Kasus Pada Kantor Wali kota Palembang)**

**Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Agung Pernandu
NIM : 222016135**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang tertandatangani dibawah ini :

Nama : Agung Pemandu
NIM : 222016135
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, Maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang,

Agustus 2023.



Agung Pemandu

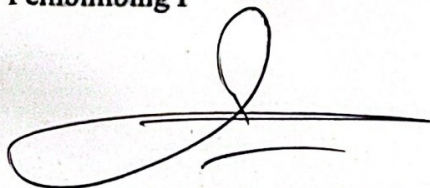
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang (Studi Kasus Pada Kantor Wali Kota Palembang)
Nama : Agung Permandu
NIM : 222016135
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

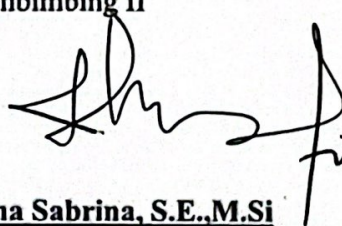
Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

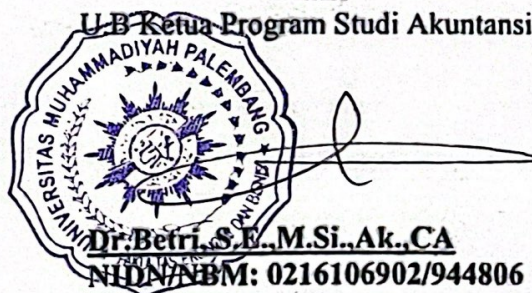
Pembimbing II



Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 021606801/851119

Mengetahui,
Dekan

U.B. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

~Q.S Al-Insyirah: 5-6~

“Aku telah merasakan seluruh kepahitan di dalam kehidupan ini. Satu hal
yang paling pahit adalah berharap kepada sesama manusia”

~Ali bin Abi Thalib~

“My name is not imam, but In Shaa Allah I can be your imam”

~Agung Pernandu~

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Bapak dan Emak Tercinta
- ❖ Ayuk, Kakak, dan Adikku
- ❖ Seluruh Kerabat Keluarga Besarku
- ❖ Dosen Pembimbing
- ❖ Almamaterku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan Judul Analisis pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Palembang. Penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab, bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab empat hasil dan pembahasan, dan bab lima simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Abdul Rosyad dan ibuku Wati, serta ayukku Yeni Astarina yang telah mendoakan dan memberi dukungan seta semangat kepada penulis. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor dan Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku pembimbing I dan II saya, sekaligus ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Sahabat-sahabat perjuanganku yang selalu saling memberi motivasi dalam menjalankan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang tentu telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini, Aamiin.

Palembang, Agustus 2023
Penulis,

Agung Pernandu

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiat	iii
Halaman Tanda Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan.....	v
Halaman Prakata	vi
Halaman Daftar Isi	viii
Halaman Daftar Tabel.....	x
Halaman Daftar Gambar	xi
Halaman Daftar Lampiran	xii
Abstrak.....	xiii
Abstract.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori	13
1. Sistem Informasi Keuangan Daerah	13
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia	18
3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
B. Penelitian Sebelumnya	26
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Operasional Variabel	36
D. Populasi dan Sampel	37
E. Data Yang Diperlukan	38

F. Metode Pengumpulan Data.....	38
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umum Tentang Kantor Wali kota Palembang.....	41
2. Visi dan Misi Kantor Wali Kota Palembang.....	43
3. Gambaran Karakteristik Profil Responden.....	45
4. Hasil Pengolahan Data.....	49
B. Pembahasan.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel terhadap LKPD Kota Palembang	9
Tabel I.2 Survei Pendahuluan	10
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	26
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	36
Tabel IV.1 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin	46
Tabel IV.2 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan	46
Tabel IV.3 Karakteristik Responden Menurut Usia.....	47
Tabel IV.4 Karakteristik Responden Menurut <i>Job Description</i>	48
Tabel IV.5 Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Relevan	49
Tabel IV.6 Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Andal	50
Tabel IV.7 Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Dapat Dibandingkan ...	51
Tabel IV.8 Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Dapat Dipahami	52
Tabel IV.9 Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Input.....	53
Tabel IV.10 Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Proses yang terjadi....	54
Tabel IV.11 Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Keluaran (<i>output</i>).....	55
Tabel IV.12 Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Hasil (<i>outcome</i>).....	55
Tabel IV.13 Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Pendidikan	56
Tabel IV.14 Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Pelatihan	57
Tabel IV.15 Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Pengalaman.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Kantor Wali Kota Palembang	41
Gambar I.2 Lambang Daerah Kantor Kota Palembang	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Kuesioner Penelitian

Lampiran Sertifikat

Lampiran Biodata Penulis

Abstrak

Agung Pernandu/222016135/2023/Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang (Studi Kasus Pada Kantor Wali Kota Palembang)

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimanakah pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 30 responden. Sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 1) Menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan meningkat. 2) Menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan meningkat.

Kata Kunci: Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Abstract

Agung Pernandu/222016135/2023/Analysis of the Use of Regional Financial Information Systems and Human Resource Capacity in Improving the Quality of Palembang City Regional Government Financial Reports (Case Study at the Palembang Mayor's Office)

The aim of this research is to analyze how regional financial information systems and human resource capacity are utilized in improving the quality of Palembang city regional government financial reports. This research uses descriptive research. The population in this study was 30 respondents. The sample used was saturated sampling. The data used is primary data. The data collection method in this research is the questionnaire method. Based on the research results, it can be concluded 1) Shows that the use of regional financial information systems has increased the quality of financial reports. 2) Shows that human resource capacity for the quality of financial reports has increased.

Keywords: Utilization of Regional Financial Information Systems, Human Resource Capacity, Quality of Regional Government Financial Reports.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan undang-undang. Lebih jauh, laporan keuangan pemerintah pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. Jadi mengatur pengelolaan laporan keuangan pemerintah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. walaupun laporan keuangan pemerintah berada pada akhir siklus pengelolaan keuangan negara, perannya amat vital sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah.

Laporan keuangan yang berkualitas tentunya sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karenanya, perlu untuk menerjemahkan apa yang menjadi kriteria laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Menurut peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat

dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah adalah media pemotret proses yang berjalan dari awal sampai akhir atas penggunaan uang rakyat. Mulai dari direncanakan, dianggarkan, sampai dibelanjakan, serta pengawasannya. Untuk itulah perlu adanya peningkatan peranan laporan keuangan dalam penyusunan siklus pengelolaan keuangan negara. Manfaat dari laporan keuangan sebagai sarana evaluasi kinerja dapat menjadi salah satu *entry point* untuk dapat meningkatkan peranan laporan keuangan.

Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (<https://djk.kemenkeu.go.id/sikd/>).

Sistem informasi Akuntansi pemerintah daerah mengacu pada peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 yang telah direvisi dengan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 yang mewajibkan setiap pemerintah daerah menerapkan sistem informasi keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sangat dibutuhkan dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Adapun untuk menghasilkan informasi keuangan yang baik dan benar, maka laporan keuangan harus disusun oleh orang-orang yang mumpuni dibidang tersebut.

Menurut Tjiptoherijanto dalam (Rioni & Saraswati, 2019) Untuk menilai kapasitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan suatu fungsi, termasuk akuntansi, hal ini dapat dilihat dari tingkat tanggung jawab dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab terlihat dari atau termasuk dalam deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah dasar untuk kinerja pekerjaan yang baik. Tanpa deskripsi pekerjaan yang jelas, sumber daya ini tidak dapat melakukan tugasnya dengan Baik.

Afrianti (2011) Dalam (Wardani & Andriyani, 2017) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia adalah Kompetensi sumber daya Orang-orang untuk melakukan tugas Serta tanggung jawab mereka dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang tepat. Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah Keahlian Individu atau seseorang, organisasi (lembaga), atau sistem untuk Menjalankan fungsi atau wewenangnya guna tujuannya dicapai secara efektif dan efisien (Zuliarti, 2012 dalam Andrianto, 2017).

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 disebutkan bahwa karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Menurut karakteristik kualitatif PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan laporan keuangan adalah kriteria normatif yang harus ada pada laporan keuangan dengan tujuan pemenuhan kualitas laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chairina & Wehartaty (2019) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Goo & Lamawitak (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sikka.

Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Kota dengan luas wilayah 400,61 km² ini dihuni oleh lebih dari 1,7 juta penduduk pada tahun Juni 2022. Kota Palembang juga kota terpadat dan terbesar di Sumatra Selatan. Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya (Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir) dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah metropolitan di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patung raya Agung atau Palembang Raya.

(Sri Rahayuningsih, 2022), Pemerintah Kota Palembang telah menggunakan sistem digitalisasi untuk semua transaksi, baik belanja maupun pendapatan. BPKAD selaku entitas akuntansi dan sekaligus sebagai entitas pelaporan keuangan Kota Palembang menggunakan sistem digital ini sesuai Keppres No.3/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Pemerintah kota Palembang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang tinggi seperti contoh pemerintah daerah kota Palembang dari BKSDM gencar melakukan peningkatan kapasitas SDM dengan program pendidikan dan pelatihan (diklat) pada jajaran pegawai pemerintahan daerah.

Informasi dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan dari semua aspek ataupun dalam hal ini kelompok pengguna seperti investor, masyarakat, dan juga pemerintah. Proses pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sudah ditetapkan. Laporan keuangan pemerintah daerah kemudian akan disampaikan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu laporan keuangan yang disajikan pemerintah telah diungkapkan dengan wajar atau tidak yaitu dengan melihat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI setiap tahunnya. Ada 4 (empat) opini yang diberikan, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini tertinggi yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dan berkualitas adalah opini WTP.

Opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk meyakini informasi yang tercantum di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Pemberian opini BPK RI, khususnya opini WTP diungkapkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, menjelaskan jika melihat perjalanan Indonesia di dalam membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggungjawab dan tentu berharap tidak hanya sekedar dari sisi status hasil audit BPK-nya WTP. Namun, yang sama penting bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat bagi instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa. (<https://bisnis.tempo.co/read/1637154/peraih-opini-wtp-makin-banyak-sri-mulyani-pencapaian-luar-biasa-di-tengah-pandemi>).

Pemerintah Kota Palembang mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021, pada 11 Mei 2022 lalu (<https://www.rmolsumsel.id/opini-wtp-12-kali-berturut-jadi-kamuflase-sistem-penganggaran-yang-kusut-bagian-pertama>).

Kenyataannya, kota Palembang yang telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut sejak tahun 2012 hingga 2021, mengalami penurunan prestasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Selatan, Kota Palembang kali ini mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

[\(https://www.sumselindependen.com/lhp-bpk-temukan-penyimpangan-dan-ketidakefektifan-palembang-gagal-raih-wtp/\)](https://www.sumselindependen.com/lhp-bpk-temukan-penyimpangan-dan-ketidakefektifan-palembang-gagal-raih-wtp/).

Menurut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD dan Walikota Palembang pada Rabu (31/5/2023) Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Selain opini atas laporan keuangan, BPK juga menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang dan mempengaruhi opini atas laporan keuangan, Diantara permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama tersebut, dijelaskan Andri, yakni klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa, serta belanja modal pada 28 SKPD tidak tepat, pengadaan Meubelair SD dan SMP Negeri pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume atas 49 paket pekerjaan pada delapan SKPD, kekurangan Kas di Bendahara Pengeluaran pada empat SKPD, penetapan kenaikan besaran Tunjangan Transportasi dan Perumahan Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan dan 17 paket pekerjaan Belanja Modal dan satu paket Pekerjaan Belanja Hibah pada tiga SKPD terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan. (<https://sumsel.bpk.go.id/2023/05/31/opini-palembang-turun-jadi-wdp-walikota-jadikan-motivasi/>).

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022, Pemerintah Kota Palembang menyajikan Belanja Modal

Peralatan dan Mesin sebesar Rp104.681.006.586,00. Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan meubelair pada Dinas Pendidikan menunjukkan terdapat indikasi pengaturan harga, spesifikasi diarahkan kepada produk dan rekanan tertentu, serta pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp6.042.678.770,00. Selain itu, pada Catatan atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Palembang menyajikan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp855.846.707.797,00. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan menunjukkan terdapat penyimpangan dan ketidakefektifan sistem pengendalian intern yang mendasar, yaitu usulan kegiatan tidak diverifikasi secara memadai dan pemaketan pekerjaan tidak memadai, pemilihan penyedia yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, pengawasan kegiatan yang tidak melibatkan konsultan sebagai pengawas eksternal, dan kekurangan volume pekerjaan atas 211 paket pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp16.611.095.602,52.

Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp8.085.121.324,96 dan telah dilakukan koreksi Aset Tetap di Neraca sebesar Rp12.633.156.515,20. Apabila nilai Belanja Modal yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca disesuaikan, maka nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin akan berkurang sebesar Rp6.042.678.770,00, nilai Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan akan berkurang sebesar Rp16.611.095.602,52, serta Aset Tetap akan berkurang sebesar Rp10.020.617.857,32.

Sistem informasi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal. Masalah-masalah yang ditemukan oleh pihak BPK dalam laporan keuangan pemerintah seperti ketidakpatuhan, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, Sistem Informasi Keuangan, Sumber Daya Manusia dalam Pelaporan Keuangan temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan.

Oleh karena itu, dengan melihat temuan BPK tentang kelemahan sistem informasi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah memerlukan perbaikan pada sistem informasi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berikut opini BPK Perwakilan Provinsi Sumsel terhadap LKPD Kota Palembang Tahun 2018-2022.

Tabel I.1
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel
terhadap LKPD Kota Palembang Tahun 2018-2022

Tahun	Opini BPK
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : <https://sumsel.bpk.go.id>

Dari tabel I.1 dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Palembang mendapatkan penurunan opini dari BPK yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP yang diperoleh Pemerintah daerah Kota Palembang dari BPK Perwakilan Sumatra Selatan menjadi fenomena yang sangat menarik perhatian penulis untuk meneliti bentuk bagaimana Pemanfaatan Sistem Informasi yang digunakan, dan kapasitas sumber daya manusianya.

Tabel I.2
Survei Pendahuluan

Nama Instansi	Hasil Survei
Kantor Wali Kota Palembang, Jl. Merdeka No.1, 22 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30113	Dari hasil survei di Kantor Wali Kota Palembang, salah satu tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan analisis pada pemanfaatan sistem informasi keuangan, kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun masih kurangnya proaktif, yakni mengalami tindakan pada sumber daya manusia (SDM) dengan indikator pendidikan dan pengalaman yang tidak sesuai dengan bidangnya dari latar belakang pendidikan sehingga dapat mereduksi atau menurunnya kualitas laporan keuangan secara langsung maupun tidak, dan tindakan-tindakan yang dapat mereduksi kualitas laporan keuangan.

Sumber : Data yang diolah, 2023

Apabila informasi sementara ini benar, berarti berbagai bentuk komunikasi selama ini dikembangkan kurang memberi manfaat. Memang berbagai informasi yang dibangun tersebut sifatnya saling mendukung, tidak

mungkin ada berdiri sendiri. Dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang?
2. Bagaimanakah Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sbb :

1. Untuk menganalisis Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
2. Untuk menganalisis Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Semoga penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis pada bidang akuntansi sektor publik, dan Dalam proses penelitian ini, penulis dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan akademik penulis. Menambahkan kepercayaan diri, dan sungguh merupakan prestasi besar yang memerlukan ketekunan dan usaha yang keras untuk menyelesaikan penelitian ini.

2. Manfaat Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan, informasi yang disajikan akan lebih jelas, lengkap, dan dapat dipahami. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik di tingkat pemerintahan, seperti Walikota, anggota dewan, dan manajemen pemerintah daerah.

3. Manfaat Bagi Almamater

Dari hasil penelitian diharapkan dapat membantu teman-teman mahasiswa lain yang sedang melakukan penelitian yang sama dan menjadi referensi bagi semua, serta dapat menjadi pegangan bagi penulis di masa depan nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Muslich dan Sri Iswati (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Andrianto, Elvin. (2018). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sleman)*. *Profita Kajian Ilmu Akuntansi*, Vol 6 No 2.
- Asari, Andi dan Zulkarnaini, Hartatik, Ahmad Choirul Anam, Suparto, Jacomina Vonny Litamahuputty, Fathan Mubina Dewadi, Dyah Rini Prihastuty, Maswar, Wara Alfa Syukrilla. Nanti Sari Murni, Tatan Sukwika. (2023). *Pengantar Statistik*. Penerbit: Mafy Media Literasi Indonesia, 106.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan. (2023). <https://sumsel.bpk.go.id/2023/05/31/opini-palembang-turun-jadi-wdp-walikota-jadikan-motivasi/>.
- Chairina, Frista dan Tineke Wehartaty (2019, Januari). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Kota Surabaya*. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, Vol 11 No 1, 31-39.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023. <https://djpk.kemenkeu.go.id/sikd/>.
- Erawati, Teguh, Dkk. (2018). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta)*. *Akmenika: Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol.15 No.1.
- Goo, Emilianus Eo Kutu dan Paulus Libu Lamawitak (2021). *Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

- Kabupatem Sikka. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, Vol 5 No 2, 98-110.
- Hasan, Iqbal. (2006). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husna, Ade dan Maryam Maryam, Samsul Ikhbar (2022, Juni). Pengaruh Kompetensi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Serambi Konstruktivis*, Vol 4 No 2.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). "Standar Akuntansi Keuangan". Jakarta: Salemba Empat.
- Khoirunnisa, Nabillah. (2021). Analisis Penerapan Dan Implementasi Sipkd Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kecamatan Kelapa Gading. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*.
- Lubis, Zulkarnain. (2021). *Statistika Terapan Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi*. 57.
- Lutfi, Asep Muhammad dan Musnaini, Abdul Rahman Safiih. (2022). *Etika Profesi dan Tata Kelola Korporate*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Mustika, Mega dan Sri Fadilah. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Universitas Islam Bandung*, Vol 6 No 2.
- Nurmala Sari, Eka. 2018. The Successful Implementation of Accounting Information System and the Quality of Government Financial Statement at Regencies and Cities in Nort Sumatera, Indonesia. *International Business Management*. Volt 12. No.4.
- Putri, Andini Utari. (2021). Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kelurahan Sukajaya Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol 12 No 2.
- Prasetyo, Eko. (2022). <https://www.rmolsumsel.id/opini-wtp-12-kali-berturut-jadi-kamuflase-sistem-penganggaran-yang-kusut-bagian-pertama>.

- Prasmono, Petrus. (2023). <https://www.sumselinden.com/lhp-bpk-temukan-penyimpangan-dan-ketidakefektifan-palembang-gagal-raih-wtp/>.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rioni, Yunita Sari dan Dwi Saraswati, Dian Khadijah Tarigan. (2019). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, Vol 9 No 2.
- Rohmah, Lailatur dan Noor Shodiq Askandar, Arista Fauzi Kartika Sari. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*, Vol. 09 No. 05.
- Rahayuningsih, Sri dan Maria Maria, Darul Amri (2022). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 3.
- Sudaryanti, Dwi. (2013). Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus: Pemda Kab Kudus). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 12 No. 01.
- Silaban, Martha warta. (2022). <https://bisnis.tempo.co/read/1637154/peraih-opini-wtp-makin-banyak-sri-mulyani-pencapaian-luar-biasa-di-tengah-pandemi>.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Bandung:: Alfabeta.
- Thian, A. 2021. Pengantar Akuntansi 1 dan 2. Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI).
- Wardani, Dewi Kusuma dan Ika Andriyani. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, Vol 5 No 2.